

**KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT
DALAM PANDANGAN DIDIN HAFIDUDIN
DAN MASDAR FARID MAS'UDI**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh

LILIYANI
NPM. 1421030252

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2018**

**KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT
DALAM PANDANGAN DIDIN HAFIDUDIN
DAN MASDAR FARID MAS'UDI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh

LILIYANI
NPM. 1421030252

Program Studi: Muamalah

Pembimbing Akademik I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S. H., M. H.
Pembimbing Akademik II : Khoiruddin, M. S. I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2018**

ABSTRAK

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Ada yang berpendapat pembayaran pajak dan zakat secara terpisah menjadi beban tersendiri sehingga akan lebih baik jika dilakukan penyatuan pajak dan zakat. Ada pula yang berpendapat bahwa pajak dan zakat sangatlah berbeda sehingga tidak dapat disatukan. Permasalahan inilah yang menjadi kajian para tokoh ulama di antaranya Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi. Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat? dan 2) Bagaimana persamaan antara Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi tentang penyatuan pajak dan zakat?

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan mengenai pendapat-pendapat Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dari buku karangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi serta buku lain yang membahas mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat. penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, Adanya persamaan pandangan baik Didin dan Masdar yaitu segala keputusan berlandaskan dengan menimbang kemaslahatan dan keadilan untuk keseluruhan. Selain itu, Didin dan Masdar juga menyetujui adanya zakat sebagai pengurang pajak agar tidak adanya yang merasa terbebani atas kedua kewajiban tersebut. Dengan melihat zakat sebagai keharusan yang wajib bagi umat Islam dan pajak sebagai keharusan atas ulil amri. Kemudian, terdapat perbedaan terhadap dua tokoh tersebut. Didin Hafiduddin menganggap pajak dan zakat berbeda baik dari segi manfaat maupun tujuannya. Selain itu, dalam tatanan lembaga pengelola zakat dan pajak dilakukan secara terpisah karena zakat merupakan keharusan yang dilakukan muslim sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi menawarkan adanya pembentukan baru dalam suatu kewajiban pembayaran antara zakat dan pajak, masdar menawarkan adanya penyatuan atau pun pengurangan pajak. Beranggapan bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu bentuk madharat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Konsep ini menekankan zakat sebagai ruh dan pajak sebagai raga yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam penerapannya pun menjadikan suatu pajak dan zakat merupakan suatu kesatuan dimana zakat lebih diutamakan daripada pajak



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Liliyani

NPM : 1421030252

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN
ZAKAT DALAM PANDANGAN DIDIN
HAFIDDUDIN DAN MASDAR FARID MAS'UDI**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui
Ketua jurusan Muamalah

H.A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

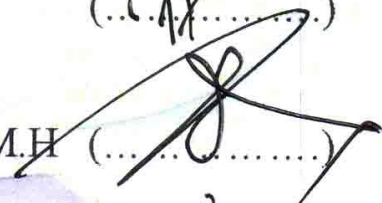
PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM PANDANGAN DIDIN HAFIDDUDIN DAN MASDAR FARID MAS'UDI** disusun oleh Liliyani, NPM.1421030252, Program Study : Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 02 Mei 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (..........)

Sekretaris : Muslim, S.H., M.H.I. (..........)

Penguji I : H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H (..........)

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H (..........)



DEKAN


Dindamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi allah.

Sesungguhnya alah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah

[2]: 110)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan pada seseorang yang selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Kepada orang tuaku Bapak Rusli dan Ibu Susilawaati yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa Ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Kakak Ida Zulaida S.Pd yang telah banyak membantu baik dari segi materil maupun moril serta masukan sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.
3. Bapak Drs Hapni yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Baik dalam penulisan maupun dalam sikap perilaku sehari-hari.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Liliyani, dilahirkan pada tanggal 04 Februari 1995 di kalianda Lampung Selatan. Putri kedua dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Rusli dan Ibu Susilawati

1. Mulai menempuh dari Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita pada tahun 2000.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI dan lulus pada tahun 2007.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Budi Pratama, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI lulus pada tahun 2010.
4. Melanjutkan pendidikan di SMA Bina Dharma Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI lulus pada tahun 2013. Selama di SMA aktif di ekstrakurikuler rebana .
5. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 02 Mei 2018

Liliyani

NPM. 1421030252

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM PANDANGAN DIDIN HAFIDUDIN DAN MASDAR FARID MAS’UDI”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah.
3. H.A Khumedi Ja’far, M.H., dan Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN

Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S. H., M. H. selaku Pembimbing I dan Khoiruddin, M. S. I. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak. Aamiin Allahumma aamiin.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak, mama, kakak dan keluarga tercinta yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
8. Sahabat-sahabat tersayang Tri Setia, Mega Septriyani, Sifa Fauziah, Windiyan Ngesti, Hernik S, Lisdiana, yang telah menemani penulis dalam mengarungi dinamika kehidupan kampus, terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan. Serta teman-teman Asrama An-Nisa yang mendukung serta menjadi penyemangat dalam penulisan ini.

9. Teman-teman Muamalah C dan seluruh teman seangkatan. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
10. Sahabat KKN Kelompok 4 Abdul Rosyid, Irsyad Al Gifari, Oriza Wulandari, Farida Aryani, Ovan Wijaya S, Harfi Dwi Zulita, dan Rizky Yuldaningsi.
11. Almamater tercinta.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis, 02 Mei 2018

Penulis,

Liliyani

NPM.1421030252

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT

A. Gambaran Umum Pajak	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Dasar Hukum Pajak	27
3. Pendapat Ahli Tentang Wajib Pajak.....	29
B. Gambaran Umum Zakat	36
1. Pengertian Zakat	36
2. Dasar Hukum Zakat	53
3. Pendapat Ahli Tentang Wajib Zakat.....	54
C. Hubungan Pajak dan Zakat Di Indonesia	60
1. Pajak dan Zakat dalam Perundang-Undangan	60
2. Persamaan dan Perbedaan Tentang Pajak dan Zakat.....	63

BAB III PENDAPAT DIDIN HAFIDUDIN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT

A. Pendapat Didin Hafidudin Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat.	
1. Biografi Didin Hafidudin	71
2. Karya-Karya Didin Hafidudin	73
3. Pendapat Didin Hafidudin Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat...	74

B. Pendapat Masdar Farid Mas'udi Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat.	
1. Biografi Masdar Farid Mas'udi	81
2. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi.....	84
3. Pendapat Masdar Farid Mas'udi Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat.....	85

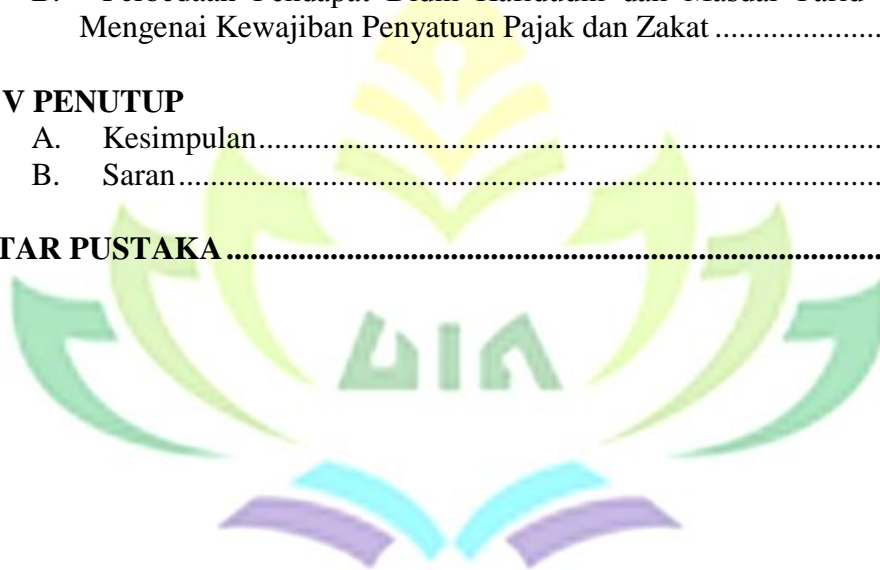
BAB IV ANALISIS DATA

A. Persamaan Pendapat Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi Mengenai Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat	95
B. Perbedaan Pendapat Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi Mengenai Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi materi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mendefinisikan kata-kata yang terkait dengan judul “**Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi Dan Didin Hafidudin**”. Adapun uraian kata-kata tersebut sebagai berikut :

1. **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.¹ Maksud kewajiban disini adalah kewajiban atas pembayaran pajak dan zakat.
2. **Penyatuan** adalah proses, cara, perbuatan menyatukan.² Maksud dalam penyatuan disini adalah penyatuan dalam pajak dan zakat
3. **Pajak** adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.³
4. **Zakat** adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, diwaktu tertentu, dan disalurkan kepada pihak tertentu.⁴
5. **Masdar Farid Mas’udi** adalah salah satu pengurus PBNU yang lahir pada 18 September 1954.⁵
6. **Didin hafidudin** adalah salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia yang

¹ W. I. S. Poerdaminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1613.

² *Ibid.*, h. 1273.

³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4 (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 6.

⁴ Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa Dan Zakat*, Terjemahan Abu Syafiq, dkk (Jakarta: Roemah Buku, 2013), h. 142.

⁵ <http://Masdarmasudi.blogspot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-Masdar-farid-masudi>
Pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 13.32.

lahir pada tanggal 21 oktober 1951.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul dari proposal ini adalah suatu kajian tentang bagaimana kewajiban penyatuan pajak dalam pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Masudi, karena diantara keduanya memiliki pendapat yang berbeda dalam mengqiyaskan pembayaran pajak dan zakat di Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendasari penulis sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah:

1. Alasan Objektif

- a. Karena di Indonesia terutama yang beragama Islam terdapat dua dasar hukum yang wajib diikuti yaitu hukum agama dan hukum positif, hal ini memunculkan dualisme pemungutan atas objek yang sama yaitu pemungutan pajak dan zakat.
- b. Adanya perbedaan dalam penafsiran hukum positif dan hukum agama yang berkaitan dengan pajak dan zakat, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mereka tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diambil erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data Fakultas, belum ada yang membahas pokok

⁶ Didin Hafidudin, *Islam Aplikatif*, Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 253.

permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul sekarang.

C. Latar Belakang Masalah

Harta yang di miliki hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang memberikan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu di keluarkan zakatnya. Hal ini terdapat dalam dalil sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).⁷

Selintas dari pemahaman zakat dari ayat di atas, zakat membersihkan dan mensucikan harta yang di miliki. Namun di Indonesia terdapat penarikan oleh Negara selain zakat yaitu pajak. Pajak sendiri bukan lah berasal dalam bahasa arab. Melainkan dalam kata lain yang artinya sama dengan pajak berupa *jizyah*, *dharibah* dan *kharaj*. Seperti dalam dalil sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponorogo, 2014), h. 203.

Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(QS At-Taubah [9]:29).⁸

Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Sedangkan, pajak pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk membayar berdasarkan ukuran tertentu atas kekayaan dan pribadi seseorang yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Dengan demikian, zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan baik untuk tujuan maupun dalam distributor.⁹

Praktik di Indonesia, terdapat dualisme penarikan pajak dan zakat yang bertujuan sama yaitu mensejahterakan umat.¹⁰ Hal ini menjadi beban disaat tertentu.

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran- saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan.¹¹ Tanah-tanah yang direbut dengan jalan perang menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 50.

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 7.

¹¹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006), h. 69

tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terkait. Dimulai dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan: Wajibkah kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak. Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu antara zakat dan pajak tidaklah bisa dipersamakan, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.¹²

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mulai tahun 2001 sebenarnya para pembayar zakat penghasilan (zakat mall) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Ini adalah langkah awal yang baik, walaupun langkah ini belumlah cukup karena zakat bukan hanya ada pada penghasilan kena pajak tapi meliputi banyak hal yang di antaranya justru oleh pemerintah tidak dikenakan pajak, tapi merupakan sesuatu yang zakatnya sangat ditekankan dalam Agama. Sebagai misal

¹² Siti Arifah, *Konstitusi Negara Berbicara: Zakat Mengurang Penghasilan Kena Pajak*, <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>, akses 20 oktober 2017

adalah zakat hasil pertanian, dan zakat hewan ternak. Namun demikian, Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan.¹³

Peranan pajak penerimaan kas Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap kenyataan ini tentu akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Setidaknya sejak Tahun 1990-an pembahasan keduanya memunculkan beberapa isu penting yang berkisar pada permasalahan eksistensi, pada aspek ini diskusi berkembang dari persoalan eksistensi sampai posisi pajak dan zakat. Seperti salah satu pendapat yang mendudukkan keduanya dalam hubungan substitusi. Menurut pendapat Umar Bin Khatab, pajak dan zakat dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. Umat Islam yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat dan sebaliknya. Problem dari pendapat ini adalah tidak tersedianya alat legislasi yang mendukung pendapat ini.

Pendapat yang lain menolak pendapat pertama. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa pajak dan zakat bersifat eksklusif satu dengan lainnya. Pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat, dan pembayaran zakat bukan merupakan pembayaran pajak.¹⁴ Problem yang muncul dari pendapat yang kedua ini adalah munculnya dualisme pemungutan atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik

¹³ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakat*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), h. 1005.

penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks menyejahterakan rakyat.¹⁵ Sehingga hal ini bisa menjadi pemicu di kalangan umat muslim untuk lebih memprioritaskan pembayaran pajak daripada zakat.

Umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di Negara-negara Islam lainnya (Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Mesir) menghadapi masalah yang aktual mengenai pajak dan zakat. Yaitu, seandainya umat Islam di Negara yang pemerintahannya tidak menangani langsung pengelolaan zakat, seperti Indonesia, dan pemerintah memungut pajak yang jumlahnya melebihi jumlah zakatnya, tetapi pemerintah menggunakan sebagian pajak itu untuk semua sebagian dari delapan pos penggunaan zakat yang dapat diketahui lewat GBHN, Pelita dan APBN. Maka apakah pembayaran zakatnya bisa diniatkan sebagai pembayaran zakatnya, atau haruskah dicari jalan keluar lain untuk menghindari *double duties*.¹⁶

Didin Hafidhuddin merupakan seorang ulama yang tentunya paham tentang permasalahan zakat di Indonesia, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS), selain aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang berbau keIslaman, Didin juga aktif di dunia akademik sehingga ketokohnya tidak terbantahkan.¹⁷

¹⁵ Eko Novianto Nugroho, *Optimalisasi Pajak dan Zakat*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/27/opi3.htm>, akses 20 Oktober 2017

¹⁶ M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 54

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 5

Masdar farid mas'udi (selanjutnya disebut Masdar) adalah seorang pemikir yang mengidolakan umar bin khatab dan juga seorang cendekiawan yang rajin menulis secara serius dan tajam analisisnya. Di bidang organisasi, beliau pernah menjadi direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) serta dalam bidang akademis beliau aktif sebagai dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara, Jakarta dan wakil penanggungjawab Pesantren Al-Hamidiyah, Depok.¹⁸

Pemikiran Masdar dan Didin tentang pajak dan zakat merupakan sebuah upaya demi terwujudnya pemerataan, keadilan, serta kesejahteraan sosial masyarakat, dan merupakan bentuk usaha untuk membangkitkan kembali kesadaran umat dan pemerintah tentang tidak kalah pentingnya zakat dibanding pajak. Gagasan-gagasan dari kedua tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk memecahkan berbagai problem kemiskinan yang semakin membelit rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin Dan Masdar Farid Mas'udi”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka penulis rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat?

¹⁸Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia”, dalam jurnal *Al-Ahkam Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23 nomor 2, Oktober 2013, h. 187.

2. Apa perbedaan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dan diharapkan berguna sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan Hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi hukum positif dan hukum Islam, serta masyarakat lebih memahami mengenai kewajiban paenyatuan zakat dan pajak.

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, catatan,¹⁹ penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, dokumen resmi, dan publikasi karya ilmiah.²⁰ Dengan meneliti dan membaca buku-buku yang berkenaan dengan materi pembahasan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, karena setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.²¹ Penelitian ini menelaah tulisan Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidudin tentang pajak dan zakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif*, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan membandingkan dari hasil analisis kedua objek dan subjek penelitian tersebut.²² Dalam hal ini mendeskripsikan pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidudin tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat.

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 107.

²¹ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 145.

²² Kaclan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan sumber data tersebut,²³ data ini terdapat dalam buku karangan Didin Hafidudin berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern Dan Masdar Farid Mas'udi berjudul Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam.
- b. Data sekunder di peroleh dari tulisan-tulisan orang lain yang berhubungan dengan kewajiban penyatuan pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidudin. Serta bahan-bahan sekunder lainnya yang meliputi Undang-Undang, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan dokumen pribadi, data arsip resmi dan publikasi pada pemerintahan.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan diawali dengan kegiatan penelusuran hukum Islam serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif dari sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁵ Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

²³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91.

²⁴ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 88-89.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 109.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Quran, Hadits, dan buku-buku lainnya).

c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematika Data (*Sistemizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁶

5. Analisis Data

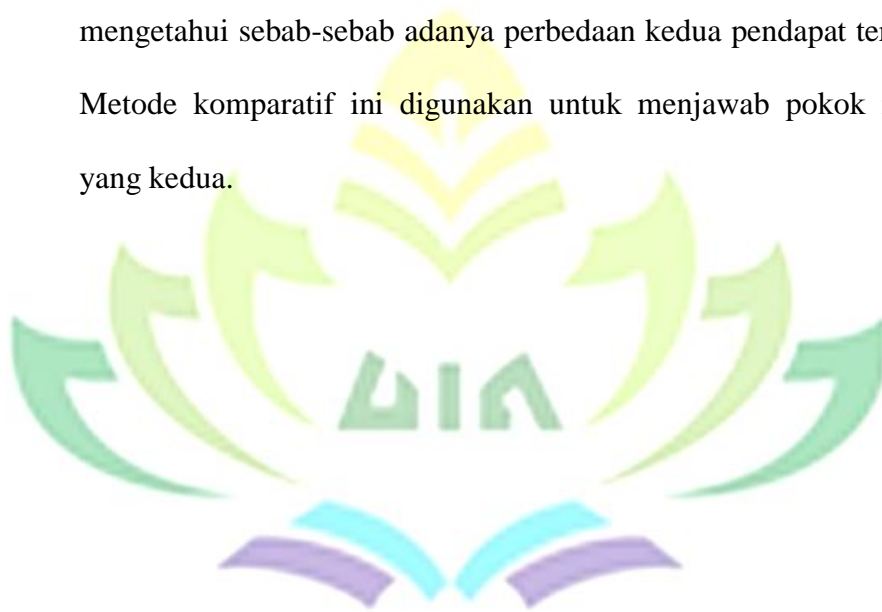
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Untuk menganalisis data digunakan metode sebagai berikut:

a. Menggunakan metode *Induktif* yaitu, menganalisis dan memaparkan data-data yang khusus, kemudian menguraikannya dalam bentuk

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

umum.²⁷ Metode induktif ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang pertama.

- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu, menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan yang bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan kedua pendapat tersebut.²⁸ Metode komparatif ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang kedua.



²⁷ Saifudin Azwar, *Op. Cit.*, h. 40.

²⁸ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 83.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT

A. Gambaran Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum.²⁹ Definisi menurut Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³⁰ Guna pajak itu ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi

²⁹ Rochmat sumitro, *Asas dan dasar perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1992), h. 2.

³⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: Eresco, 1982), h.

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³¹

Menurut Feldman pajak yaitu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.³²

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun definisi pajak menurut undang-undang tersebut, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

Pajak menurut para ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.³⁴

³¹ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak, Cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

³² *Ibid.*, h. 3.

³³ *Ibid.*, h. 5.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *OP. Cit.*, h. 999.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran atau pemungutan. Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka disebut iuran. Sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut pungutan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau dewan perwakilan rakyat.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.³⁵
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran serta mencapai tujuan-tujuan negara dalam berbagai bidang. Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namun sebenarnya

³⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, (Jakarta : Granit, 2003), h. 12.

fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak sebab pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*). Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. contoh: penerimaan yang berasal dari sector pajak mencapai 71,4% dari keseluruhan penerimaan negara pada RAPBN 2001.
- b. Fungsi mengatur (*regulair*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya : 1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.³⁶

Pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2018. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus

³⁶Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 2.

sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak yang dipungut.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.³⁷

³⁷ *Ibid.*, h. 6.

Pajak di Indonesia dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis pajak menurut golongannya

- 1) Pajak langsung adalah Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan.

b. Jenis pajak menurut sifatnya

- 1) Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari dari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contohnya pajak pendapatan nya adalah 1944 dan pajak penghasilannya 1984.
- 2) Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB), karena pajak bumi dan bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak pusat (negara) adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. contohnya bea materai, PBB, PPh, PPN dan lainnya.
- 2) Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP no. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah PP no. 34 Tahun 2000. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak provinsi. Contohnya: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya.
 - b) Pajak kabupaten/kota. Contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.³⁸

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa tata cara yang dapat dilakukan selain berdasarkan undang-undang yang berlaku, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel yaitu:
 - 1) Stelsel nyata (*real stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun pajak yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang

³⁸ *Ibid.*, h. 3.

dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu Tahun dianggap sama dengan Tahun sebelumnya, sehingga pada awal Tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama Tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir Tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal Tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir Tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, dan sebaliknya.

b. Asas pemungutan pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. System pemungutan pajak

1) Official assessment system adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) With holding system adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan memiliki ciri-ciri wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.³⁹

Berbeda dengan pajak, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak sering disebut hukum fiskal. Pemerintah sebagai pemungut dan administrasi pajak disebut dengan Fiskus. Hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 macam; yaitu hukum pajak materiel dan hukum pajak formil.⁴⁰

Hukum pajak materil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma tentang:

- a. Obyek pajak: yaitu obyek apa yang dikenakan pajak. Obyek pajak sering disebut tatsbestand.
- b. Subyek pajak; yaitu siapa yg dikenakan pajak.
- c. Tarif pajak.

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2003), h. 6.

⁴⁰ Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*. (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 5.

- d. Sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak materiel menjadi suatu kenyataan atau realisasi.

Hukum pajak formil antara lain memuat:

- a. Tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan.
- c. Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan.
- d. Prosedur pengajuan surat keberatan, banding dan sebagainya.

Istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*,⁴¹ yang artinya adalah beban. *Adh-Dharibah* disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.⁴²

⁴¹ Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 24.

⁴² Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 27-30.

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁴³ Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.⁴⁴

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁴⁵ Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt .
- b. Obyeknya harta.
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *OP.Cit.*, h. 998.

⁴⁴ Gazi Inayah, *Op.Cit.*, h. 24.

⁴⁵ Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmililmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), h. 138.

- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (*abadi*).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.

- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.⁴⁶

Pajak atau *ad-dharibah* menurut Islam memiliki perbedaan dengan pajak konvensional. Sehingga dalam Alqur'an terdapat istilah-istilah yang mirip dengan pajak atau *dharibah* sebagai berikut:

- a. Al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam).
- b. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam).
- c. Al-'Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

2. Dasar Hukum Pajak

Kewajiban tentang pembayaran pajak memang masih perlu ditanyakan, karena tidak ada nash yang sah dan jelas dalam Al Qur'an. Akan tetapi, dalam Al-Quran terdapat ayat yang merujuk pada pajak seperti sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

⁴⁶ Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 14 Februari 2018

*kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS. At-Taubah [9]: 29).*⁴⁷

Selintas dari ayat di atas “*sampai mereka membayar jizyah dengan patuh...*” terdapat kata Jizyah yang merupakan salah satu istilah yang menunjukan kepada pajak. Jizyah sebenarnya berbeda dengan pajak, akan tetapi dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’I, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Jizyah secara bahasa adalah nama suatu kharraj (pajak) yang dibebankan kepada kafir ahli dzimmah. Disebut demikian karena sesungguhnya jizyah dapat melindungi nyawa mereka. Dan secara syara’ adalah harta yang disanggupi oleh orang kafir dengan akad tertentu.⁴⁸

Pembayaran pajak di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang, maka pemungutannya dilakukan dengan system administrasi yang akurat dan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikenakan sanksi denda bahkan dikenakan sanksi pidana.

Aturan-aturan perpajakan sendiri telah banyak yang diundangkan lengkap dengan revisiannya ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan berbentuk peraturan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 191.

⁴⁸ Imam Syafi’I, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al-Fiqh*, (Beirut: Lubnan, 1979), h. 233-284.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan lain-lain.

3. Pendapat Ahli Tentang Wajib Pajak

Mengatur kekayaan, Islam menjadikan kemaslahatan bersama misalnya untuk mensucikan kekayaan maka terdapat zakat yang mana berfungsi untuk membantu sesama makhluk Allah SWT.

Pendapat para ahli tidak saling menutupi dan tidak bertentangan. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan

tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.⁴⁹

Ada kaum muslim lain sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat ra. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in.⁵⁰ Dalil-dalil yang mereka kemukakan yaitu:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤْا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 169-181.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 973.

*penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 177).*⁵¹

Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan.⁵²

Pemungut pajak yang dibolehkan menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.*⁵³

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara dan lain- lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternative sumber baru. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi, telah melahirkan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan dan tidaknya.

Menanggapi adanya kewajiban terhadap pembayaran pajak, Qadhi Abu bakr bin Al-Arabi seorang ahli fikihgolongan Maliki menyatakan dalam

⁵¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 27.

⁵² Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 148.

⁵³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

Ahkam Al-Qur'an bahwa pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Apabila telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut.⁵⁴

Abu Yusuf menyatakan dalam kitab Al-Kharaj, semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan kemurahan dan keadilan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁵ Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah berpendapat bahwa jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.⁵⁶

Menurut M. umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Economic Challenge* menyatakan bahwa hal negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum muslim padahal negara memerlukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.⁵⁷

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 991.

⁵⁵ Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995), h. 294.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 294.

⁵⁷ *Ibid.*

Ibnu Taimiyah mendukung kuat diterapkannya pajak (dharibah) tambahan. Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmuatul Fatawa mengatakan larangan penghindaran pajak sekalipun tidak adil berdasarkan argument bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.⁵⁸

Sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak. Menurut Hasan Turobi dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.⁵⁹

Yusuf Qardhawi mengakui adanya perbedaan yang tajam mengenai hal ini. Masing-masing memiliki dalil dan argument yang sangat kuat.⁶⁰ Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi bahwa terdapat persamaan dalam pendapat para fuqaha yaitu para ulama tidak menantang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (dharurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang

⁵⁸ *Ibid.*, h. 297.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 294.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 974.

dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.⁶¹

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, h. 299.

⁶² *Ibid.*, h. 295.

Islam memiliki berbagai sumber pendapatan negara selain dari zakat dan pajak. Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Sumber Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr – Shadaqah	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian /dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr – Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Sumber Data: Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.⁶³

B. Gambaran Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna tumbuh, barakah, bersih, kebaikan, jernihnya sesuatu, dan pujian. Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam ayat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah [9]: 103).*⁶⁴

Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan dan menumbuhkan pahala orang yang melaksanakannya.⁶⁵ Adapun pengertian secara terminologi zakat merupakan sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain.⁶⁶

⁶³ Gusfahmi, *OP.Cit.*, h. 85-86.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 203.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*, (Damaskus: Daar El-Fikr, 1997), h. 83.

⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: Matahari Masa, 1969), h. 11.

Banyak ulama yang mendefinisikan zakat. Berikut ini merupakan definisi zakat menurut para Ulama Fuqaha :

- a. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁶⁷
- b. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.⁶⁸
- c. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hanabillah memberikan definisi bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
- e. Menurut Nawawi, Zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

⁶⁷ Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 93.

⁶⁸ Abdul Qadim, *Op.Ci.*, h. 147.

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

- f. Menurut Al Mawardi, Zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
- g. Menurut Asy Syaukani, Zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak berhalangan syara' sebagai penerima.
- h. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁶⁹

Zakat memiliki manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya keseluruhan.⁷⁰ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.

Pertama, perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

⁶⁹ Ghazi Inayah, *Op. Cit.*, h. 3

⁷⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Ma'dhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada penerimanya, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan menjadi miskin dan menderita.⁷¹

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) dan salah satu bentuk konkret dari jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

⁷¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁷²

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁷³ Monzer Kahf menyatakan zakat dan system pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁷⁴ Sedangkan menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokongan dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'a.⁷⁵ Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah mencapai nishab.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga

⁷² *Ibid.*, h. 12.

⁷³ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiah, 1986), h. 99.

⁷⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), h. 88.

⁷⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2001), h. 75.

memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfik. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasa asset-aset umat Islam.

Adapun orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat yaitu harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merdeka. Berdasarkan kesepakatan ulama tidak wajib zakat atas budak.

Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik atas apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya, meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti yang ada pada tangan rekanan kerjanya dan wakilnya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, sebab kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Juga, karena tuannya tidak memiliki harta budaknya.

- b. Islam. Tidak ada wajib zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama.

Sebab ibadah zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Syaf'iyah berbeda dengan yang lainnya, mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islam, zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang

murtad. Sebab, orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi'i, hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan, jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih, maka wajib zakat, jika tidak tampak maka tidak.

- c. Baligh-akal. Syarat ini menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat, baligh-akal tidak disyaratkan. Karena adanya pendapat yang masih mempertanyakan adanya zakat orang gila yang di wakikan atau anak yang diwakikan kepada walinya.

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Ahmad Musthafa Al- Maraghi ketika menjelaskan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, hasil tani, , hasil pertambangan, maupun hasil ternak⁷⁶

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata maal, yang bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana yang dikutip Yusuf

⁷⁶ Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi* , Jilid 1, (Kairo: Maktabah Djarisah, 1365 H), h. 39.

Qardhawi, mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.⁷⁷

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishabnya, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut. Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa zakat tidak akan diterima dari harta yang ghulul (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang baik dan halal.⁷⁸

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 57.

⁷⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, *Op.Cit.*, h. 20.

Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.

Ketiga, milik penuh yaitu harta tersebut berada di bawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.⁷⁹ Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mirip).

Keempat, menurut pendapat jumhur ulama harta tersebut harus mencapai nishabnya yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nisablah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak dan sedekah.⁸⁰

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muazzaki dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, tidak terikat dengan ketentuan haul (berlaku waktu satu tahun), ia harus

⁷⁹ *Ibid.*, h. 22.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 24.

dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya, jika mencapai nishabnya.

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.⁸¹

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Mereka adalah delapan golongan seperti tercantum dalam dalil sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah [9]: 60).*⁸²

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut:

⁸¹ *Ibid.*, h. 26.

⁸² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 196.

a. *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir itu, baik ia menyatakan maupun tidak dinyatakan kepayahannya hidupnya, diketahui oleh umum.⁸³ Jumhur Ulama berpendapat bahwa fakir adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan. Berkenaan dengan masalah fakir ini perlu diperhatikan:

- 1) Orang yang jauh dari hartanya, atau mempunyai piutang tetapi belum jatuh temponya, tetap berhak atas zakat sebagai orang fakir.
- 2) Orang yang cakap berusaha, tetapi tidak dapat melakukannya karena sibuk dengan kegiatan menuntut dan mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu lain yang tergolong fardhu kifayah, boleh menerima zakat sebagai fakir, tetapi mereka yang dapat belajar sambil berusaha, atau yang tidak cukup cerdas untuk dapat menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya, atau yang tinggal di madrasah tanpa belajar, tidak berhak menerima zakat.
- 3) Orang yang tidak berusaha karena menyibukan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah (*nawafil*), tidak dibenarkan menerima zakat sebagai orang fakir, sebab berusaha dan hidup

⁸³ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 226.

mandiri lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah, tetapi tergantung atau selalu mengharapkan bantuan orang lain.

4) Orang yang keutuhannya dicukupi oleh kerabat atau suaminya tidak berhak atas zakat sebagai fakir.⁸⁴

b. *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir. Oleh karena itu, orang miskin jarang menampilkan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin.⁸⁵

c. *Amilin*, yaitu orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.⁸⁶

Amil tetap diberi zakat walaupun ia kaya karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan merupakan pertolongan bagi

⁸⁴ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Ogos, 1995), h. 175-176.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 226.

⁸⁶ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), h. 142

yang membutuhkan. Kelompok amil zakat berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal $\frac{1}{8}$ atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya tidak mendapatkan bagian zakat $\frac{1}{8}$, melainkan hanyalah sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja. Bagian untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.⁸⁷

- d. *Mualaf*, yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia.⁸⁸ Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan:

⁸⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Op. Cit.*, h. 134.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 135.

- 1) Orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk islam.
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
 - 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).⁸⁹
- e. *Fi al-Riqab*, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud al-Riqab di sini adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuan-tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.⁹⁰ Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.⁹¹
- f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Iman Syafi'i, golongan *Al-Gharim* ada 3 macam:

⁸⁹ *Ibid.*, h. 227.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 178.

⁹¹ Hikmat Kurnia, *Op.Cit.*, h. 146.

- 1) Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.
 - 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.⁹²
 - 3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.⁹³
- g. *Fi Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekadar biaya perang. Pada zaman sekarang bagian fi sabilillah dipergunakan untuk membebaskan orang Islam dari hukuman orang kafir, bekerja mengembalikan hukum Islam termasuk jihad fi sabilillah diantaranya melalui pendirian pusat Islam yang mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah dan kekufuran serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh-musuhnya.
- h. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang, atau akan, melakukan perjalanan (*musafir*). Orang *musafir* dapat diberi dari zakat, dengan syarat:
- 1) Perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang sah, orang yang

⁹² Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *OP. Cit.*, h. 227.

⁹³ Lahmuddin Nasution, *Loc.Cit.*

melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.

- 2) Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.⁹⁴

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.⁹⁵

Zakat sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah biasa disebut juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Maal sendiri menurut bahasa berarti harta. Jadi, zakat maal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat

⁹⁴ *Ibid.*, h. 179.

⁹⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung : Penerbit Marja, 2008), h. 9.

muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya

2. Dasar Hukum Zakat

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan spiritual antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkannya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui dana zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali di antaranya disebut bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan

salat, merupakan salah satu perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam.⁹⁶ Salah satu ayat menjadi acuan berzakat adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).*⁹⁷

Pemahaman dalam “ambillah zakat dari sebagian harta mereka...” menjelaskan bahwa ditekankannya untuk mengeluarkan zakat dari harta telah ditentukan. Selain dalam Al-Qur’an terdapat dalam hadist. Imam Bukhori dan Muslim menghimpun hadist-hadist yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadist. Di antara hadist yang paling populer mengenai zakat adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُؤَدَّ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ

*Hadist riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi Saw. Bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji. (HR Muslim, no. [16]- 19).*⁹⁸

3. Pendapat Ahli Tentang Wajib Zakat

⁹⁶ Ujang Mahadi, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pns, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, (Bengkulu: PPIK, 1998), h. 13.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 203.

⁹⁸ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, 1995 M), h. 253.

Ekonomi Islam membatasi asas-asas zakat dalam beberapa teori yang memiliki berbagai macam pemahaman dan landasan hukum. Beban-bekan keislaman itu tidak mungkin bersumber pada transaksi keuangan antara pejabat pemerintah dengan orang mukallaf. Sesungguhnya kewajiban zakat dasarnya adalah hukum ilahi, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, aplikasinya adalah merealisasikan hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist secara sempurna dan benar melalui pemerintahan sebagai pemungut zakat dari masyarakat. Akan tetapi, masih banyak perbedaan pendapat mengenai harta sebagai objek yang dizakati.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai zakat berkaitan dengan barang atau pertanggungannya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa menurut salah satu di antara dua pendapat Asy-Syafi'I, zakat itu wajib dibayar menurut pertanggungan. Yang kedua, zakat itu wajib dibayar sesuai dengan barangnya. Adapun dibolehkannya pengeluaran zakat selain ketentuan nisab tersebut di atas adalah rukhshah (keringanan).

Perbedaan pendapat tersebut mempunyai arti, bahwa kalau zakat itu menurut pertanggungan, sedang harta itu berulang sampai dua tahun tapi belum juga dizakati, maka wajib dikeluarkan zakatnya sejak tahun lalu sampai dengan tahun yang kedua tanpa dikurangi. Dan begitu pula kalau harta itu melebihi dari nishab, juga zakatnya tak boleh dikurangi sekalipun telah berulang bertahun-tahun.⁹⁹

⁹⁹ Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terjemahan oleh Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987), h. 122.

Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Adapun mengenai fardhu dan wajibnya zakat atas orang Islam sudah merupakan ketetapan yang tercantum tegas sekali di dalam kitab Allah dan tak mungkin di takwilkan kemana-mana . seperti dalam surah sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلْ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. (QS. Al-Hajj [22]: 78).¹⁰⁰

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. Al-Ma'arij [70]: 24-25).¹⁰¹

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa zakat itu fardhu 'ain. Sedangkan orang yang telah mengakui fardhunya zakat apabila tak mau berzakat, maka zakat itu tetap diambil darinya secara paksa dan dipaksa menunaikannya. Kalau tetap menolak maka wajib diperangi sampai zakat itu berhasil diperoleh. Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Meskipun hal ini awalnya di tentang oleh Umar.¹⁰² Nash-nash hukum juga banyak yang mengakui adanya kewajiban zakat, bahwa zakat adalah merupakan hak dalam harta.

Realisasi dari hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah bukti pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap hukum Islam, di dalamnya ada hak kepemimpinan sebagai warga masyarakat dan sebagai mukallaf yang

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 341.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 571.

¹⁰² *Ibid.*, h. 39-52.

terpanggil untuk merealisasikan prinsip-prinsip solidaritas social dengan mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat sebagai saham dalam mengemban beban masyarakat luas. Oleh karena itu terdapat beberapa teori yang menjadi alasan kewajiban zakat sebagai berikut:

- a. Teori khilafah. Dasar teori ini adalah bahwa semua harta itu milik Allah sedangkan manusia hanyalah sebagai pengemban saja, maka manusia harus mampu mengemban beban khilafah itu. Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Thaha [20]: 6).¹⁰³

Semua yang ada di jagad ini adalah milik Allah SWT bahkan sampai debu kecil di langit dan di bumi. Wakil itu menduduki tempat yang diwakilkan dengan ketaatan, membelanjakan dan infak.

- b. Teori beban umum. Teori ini muncul atas dasar bahwa hak Allah dalam menetapkan beban terhadap hamba-Nya dan sesuai dengan kehendak-Nya, seperti ibadah fisik atau ibadah amaliyah yang murni hanya untuk Allah, memuji kepada-Nya serta taat kepada-Nya. Asas kehidupan manusia adalah ibadah dan ibadah adalah taklif (beban). Barang siapa taat, maka ia selamat dan barang siapa tidak taat, maka ia selamat dan barang siapa tidak taat maka ia akan durhaka. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban amalnya, baik amal yang baik maupun yang

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 312.

buruk. Manusia itu mukallaf dan dia diciptakan bukan untuk main-main.

c. Teori jaminan social. Dasar teori ini adalah hak masyarakat dalam mengelola hartanya. Sebagai anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus dilindungi, dibantu apa yang mereka lakukan, diringankan bebannya dan diayomi, bukan karena belas kasihan. Warga masyarakat harus memiliki solidaritas, saling membantu. Hal ini karena manusia adalah makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri, atau keluar dari masyarakat. Manusia dapat bekerja dan mendapat kemudahan karena bantuan orang lain dan harta yang diperoleh juga dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh mengeluarkan hartanya kecuali pada hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, setiap pemborosan belanja akan berdampak negative bagi masyarakat.

d. Teori persaudaraan. Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan dalam keyakinan dan kemanusiaan, kaidah persaudaraan dalam keyakinan itu adalah system rohani yang saling terkait, mendarah daging, belas kasih dan solidaritas antara saudara dalam masyarakat insani yang satu. Islam menjelaskan kaidah-kaidah interaksi manusia, Islam membangun hubungan manusia dengan yang lain, maka kemudian disyariatkannya zakat untuk merealisasikan hubungan

manusia supaya saling menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan orang miskin dan lain-lain.¹⁰⁴

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan fardhu 'ain bagi orang-orang yang telah cukup syarat-syaratnya.¹⁰⁵ Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebaskan dari hal demikian.¹⁰⁶ Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.

Mula-mula zakat itu berbentuk ibadah dan syiar agama yang dilakukan untuk mendekatkan diri selaku Muslim kepada Allah SWT. Pada waktu menunaikan zakatnya, merasa telah menunaikan satu rukun Islam dan satu cabang Iman. Dengan zakat itu, telah menolong orang untuk mentaati perintah Allah. Ditinjau dari segi ini, membayarkan zakat itu berarti membantu ketaatan dan menolak kefasikan dan kekufuran.¹⁰⁷

Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah, atau karena lewat tahun. Zakat tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak apabila sudah mencapai nisabnya.

¹⁰⁴ Gazi Inayah, *Op.Cit.*, h. 36-42.

¹⁰⁵ Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-30, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), h.

¹⁰⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 89.

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 1006.

Hukum syara menentukan batas nishab dari jenis harta yang dipergunakan untuk menolong itu dan diperhitungkan pada besarnya kewajiban itu dengan factor biaya dan tenaga.¹⁰⁸

C. Hubungan Pajak dan Zakat Di Indonesia

1. Pajak dan Zakat dalam Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara semi sekuler yang berupaya memisahkan antara hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Oleh karena itu, system penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, dan bukan pada zakat. Akibatnya, seorang muslim yang berkeinginan membayar zakat akan terkena beban ganda. Pertama, membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, membayar zakat menurut ajaran Islam.¹⁰⁹

Membayar zakat sama nilainya dengan membayar pajak, yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Namun kedua-duanya memiliki tujuan yang sama yakni merupakan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan nagara dalam kehidupan dunia kini nyata.¹¹⁰

Berkaitan dengan penempatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) tentang

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 1007.

¹⁰⁹ Mursyid, *Op. Cit.*, h. 72.

¹¹⁰ Pengantar Didin Hafiduddin dan Miranty Abidin, *Titik Temu Zakat dan Pajak*, (Jakarta:Peduli umat, 2001), h. 5.

Pajak Penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dan pajak.

Pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga Negara Indonesia yang mampu. Undang-undang ini memang tidak menyebutkan hukum bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah secara eksplisit bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq , dan amil zakat.

Kedua, pemerintahan telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat di berbagai tingkat kewilayahan, dari kecamatan hingga nasional. Pemerintah juga mengukuhkan, membina, melindungi dan mengawasi Lembaga Badan Amil Zakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Ketiga, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat akan dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam tersebut, dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan

kena pajak. Dengan kata lain sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan bruto maupun neto.

Sebagai catatan, bahwa antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 daari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidaklah konsisten. Sebab seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan. Padahal, di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa tambahan atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah (semua) harta atau kekayaan yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, jasa dan rikaz.

Kesalahpahaman ini disebabkan dua alasan. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat tentang seberapa jauh zakat berhak masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Aturan tata hukum negara Indonesia, pembayaran zakat bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak. Zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan bruto maupun neto. Hal ini dilandaskan pada Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.163/PJ./2003 tentang Perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam Pajak Penghasilan, dijelaskan dengan tegas bahwa zakat dapat mengurangi pajak setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
- b. Zakat dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Zakat yang dibayarkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final.
- d. Zakat penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai pengurangan PPh pada zakat tersebut dibayarkan.
- e. Melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh BAZ atau LAZ penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.¹¹¹

2. Persamaan dan Perbedaan Tentang Pajak dan Zakat

Pajak dan zakat dalam hal ini memiliki persamaan dan perbedaan yang nampak. Menurut Yusuf Qardhawi, persamaan mengenai pajak dan zakat adalah sebagai berikut:

¹¹¹ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Sketsa, 2009), h. 33-38.

- a. Sama-sama mempunyai unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka mempunyai kekuatan. Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.¹¹²
- b. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan pada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Qur'an : amil zakat.
- c. Dalam ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat. Pezakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan,

¹¹² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Op. Cit.*, h. 53.

kelemahan, dan penderitaan hidup. Selain itu pula ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.

- d. Pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek –aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.¹¹³

Adapun segi perbedaan antara zakat dan pajak sangatlah banyak. Menurut Yusuf Qardhawi perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Akan tetapi terdapat segi yang paling penting yang di kemukaannya. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dari Segi Nama dan Etikanya:

Perbedaan antara zakat dan pajak nampak dari etikatnya, baik arti maupun kiasan. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkembang. Dalam syari'at islam zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 276 yang artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"* Sedangkan pajak diambil dari kata *dharaba*,

¹¹³ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 999.

yang artinya utang, pajak, tanah atau upeti. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 61 yang artinya: “ *Dan timpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan.*” Demikian biasanya orang memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang berat.¹¹⁴

Adapun kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah. Mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci bila dikeluarkan zakatnya dan untuk menghilangkan segala kotoran, sifat tamak, dan kikir. Zakat memberikan berkah bukan hanya yang mengeluarkan tetapi juga bagi yang menerima pula.

b. Mengenai Hakikat dan Tujuannya

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.¹¹⁵

Zakat dalam fiqh Islam dimasukan ke dalam bab ibadah, karena mengikuti jejak Qur'an dan sunah yang menyebutkan zakat bersama dengan salat. Zakat itu ibadah, syiar agama, dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum Muslimin. Syariat Islam yang bersifat

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 1001.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 1002.

toleran tidak mewajibkan suatu kewajiban harta yang bercorak ibadah dan syiar itu kepada mereka yang bukan Islam. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang, sesuai dengan ketentuan wajib setor.

c. Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Selain itu, Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Seorang pun tidak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syari'at. Tidak boleh pula menambah atau mengurangi ketentuan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kita tidak membenarkan orang-orang yang berbuat semena-mena menyeru untuk menambah ketentuan mengenai kewajiban itu karena adanya perubahan ekonomi, sosial yang terjadi pada zaman sekarang. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan dan dihapuskan pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁶

d. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungan.

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Zakat akan berjalan terus menerus selagi Islam dan kaum Muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 1003.

Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, presentase, dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Pajak akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.¹¹⁷

e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Qur'an dan dijelaskan oleh Rosulullah SAW dengan perkataan dan perbuatannya. Sasaran itu kemanusiaan dan keislaman, sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum negara, sebagai mana ditetapkan pengaturan oleh penguasa. Oleh karena itu, anggaran zakat terpisah dari Anggaran Belanja Negara secara umum. Zakat harus dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan Al-Qur'an sebagai suatu kewajiban.¹¹⁸

f. Hubungannya dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, pemerintah yang memungutnya dan juga membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua, bila menghendaki. Apabila pemerintah membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 1004.

denda. Adapun zakat adalah hubungan pezakat dengan Tuhannya. Allah lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat. Semata-mata karena mengikuti perintahnya dan mengharapkan ridho-Nya. Apabila tidak ada pemerintah Islam yang dapat menghimpun zakat dari para wajib zakat , maka diperintahkan oleh Agama Islam untuk membagikan zakatnya sendiri kepada yang berhak.¹¹⁹

Kewajiban zakat tidak gugur daripadanya karena adanya sebab tadi. Dengan demikian seorang Muslim wajib membayarkan zakatnya dengan sukarela karena mengharap diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu seorang muslim ingin sekali menunaikan zakatnya dan tak mau menghindari dari membayar zakat seperti kebanyakan orang, selalu ingin menghindari dari membayar pajak. Jika tidak dapat menghindar, maka mereka membayarnya juga meski terpaksa. Tapi seringkali menemukan orang dari kalangan kaum Muslimin yang membayar zakat lebih dari batas kewajibannya karena mengharapkan pahala dengan rida Allah SWT.¹²⁰

g. Maksud dan Tujuan

Zakat mempunyai tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Tujuannya cukup jelas dan tegas dalam firman Allah mengenai keadaan pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat, Firmannya adalah : '' *Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, h. 1005.

itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoa lah buat mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentuan jiwa bagi mereka.

Pajak tidak mempunyai tujuan yang luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak. Selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (mazhab netral pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, maka mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan), dan timbullah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti anjuran untuk derma, menabung, dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan sampingan di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan akan tetapi para perencana perpajakan dan ahli-ahli keuangan pada umumnya. Selain itu, para ahli fikir bidang itu tidak dapat keluar lebih jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.¹²¹

¹²¹ *Ibid.*

BAB III

PENDAPAT DIDIN HAFIDUDIN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT

A. Pendapat Didin Hafidudin Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat

1. Biografi Didin Hafidudin

Didin Hafiduddin lahir di Bogor, 21 Oktober 1951. Dalam dirinya mengalir darah biru pesantren, sebab masih keturunan keluarga besar Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Jenjang pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Islam (lulus 1963), melanjutkan ke SMP (lulus 1966), dan SMA (lulus 1969).¹²²

Setelah itu Didin kuliah di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, selesai pada 1979. Kemudian melanjutkan ke Program Pascasarjana IPB mengambil Jurusan Penyuluhan Pembangunan. Jenjang S2 ini ditempuh hanya dalam waktu setahun, 1986-1987. Untuk memperdalam bahasa Arab, pada 1994 ia kuliah di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia selama setahun.¹²³

Wawasan keagamaan Didin sangat dipengaruhi oleh perjalanan menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Ia pernah menimba ilmu di Pesantren ad-Dakwah Cibadak, Pesantren Miftahul Huda Cibatut Cisaat, Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe Cigunung Sukabumi.

Setelah menamatkan pendidikan S1, pada 1980 Didin dipercaya sebagai staf pengajar Pendidikan Agama Islam di IPB. Selain itu juga mengampu

¹²² Didin hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 253.

¹²³ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Syariah principles on management in practice*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 216.

matakuliah Tafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor. Di universitas ini, Didin sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah periode 1983-1986, rektor periode 1987-1991, lalu Dekan Fakultas Agama Islam universitas yang sama. Jabatan lain yang disandangnya adalah Sekretaris Majelis Pimpinan BKSPPI dan Anggota Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDI).

Didin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin.¹²⁴

Selain memimpin pesantren, Didin kerap menggelar pengajian rutin di berbagai majelis taklim. Misalnya, pengajian bulanan yang diselenggarakan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI). Di sini ia membacakan kitab *Tafsîr Jalâlain* dan *Sahîh Bukhari*. Juga pada pengajian Mu'allimin Bogor. Ia membacakan kitab *Tafsîr Jalâlain*, *Mukhtâr al-Ahâdîs*, dan *Kifâyah al-Akhyâr*.

Didin aktif sebagai dosen IPB dan dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pemimpin Pesantren Sarjana dan mahasiswa "Ulil Albaab" Bogor. Serta Direktur Syari'ah and Banking Institute (SEBI), Ketua Dewan Syari'ah Dompot Dhuafa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat

¹²⁴ *Ibid.*, h. 217.

Nasional (BAZNAS) Anggota Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan Syari'ah Bank Syari'ah BUKOPIN, Bank Syari'ah IFI, Bank Syari'ah Amanah Umah Bogor, Anggota Dewan Syari'ah Syarikat Takaful Indonesia (STI), Dewan Syari'ah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), dan Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ).¹²⁵

2. Karya-Karya Didin Hafiduddin

Karya-karya Didin Hafidhuddin dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan antara lain :¹²⁶

- a. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).
- b. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Gema Insani, 2002).
- c. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Gema Insani, 2003).
- d. *Islam Aplikatif* (Gema Insani, 2003).
- e. *Solusi Islam Atas Problematika Umat* (Gema Insani Press, 2000).
- f. *Refleksi Tiga Kyai* (Republika, 2004).
- g. *Sederhana Itu Indah* (Republika, 2000).
- h. *Dakwah Aktual* (Gema Insani, 1999).
- i. *Menjadi Pribadi Qur'ani*.
- j. *Tafsir al-Hijri* (Kalimah,), mengulas tentang kajian Tafsir al-Qur'an

Karya-karya beliau dalam bentuk terjemahan dari karya penulis lain,

¹²⁵ *Ibid.*, h.232.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 233.

diantaranya :¹²⁷

- a. *Hukum Zakat* (terjemah kitab Fiqhu az-Zakat, Yusuf al-Qardlawi).
- b. *Pedoman Hidup Muslim* (terjemah kitab Minhajul Muslimin, Abdurrahman al-Jazairi).
- c. *Konsep Ekonomi Islam* (Yusuf Qardhawi)

3. Pendapat Didin Hafidudin Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat

Didin dalam karya-karyanya berpendapat bahwa pajak merupakan suatu tuntutan (ajaran) yang ada dalam Islam. Hal ini, ia kaitkan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat saja, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sector kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.¹²⁸ Akan tetapi, dengan syarat apabila dana zakat belum memenuhi secara menyeluruh dan optimal. Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah [2]: 195).*¹²⁹

¹²⁷ *Ibid.*, h. 234.

¹²⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Op. Cit., h. 60.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 30.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya, menurut pemikiran didin wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sector kehidupan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan, keamanan, atau bidang-bidang lainnya.

Pendapatnya tentang kaum muslimin wajib menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping penunaian kewajiban zakat. Didin berlandaskan pada alasan dan nash yang mendukung pendapatnya:

Pertama , pada firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah

[2]: 177).¹³⁰

Didin mengikuti penjelasan ayat tersebut (“... *Dan memberikan harta yang dicintainya...*”) kepada penafsiran yang dilontarkan oleh Imam Qurthubi yang menjelaskan bahwasannya para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin walaupun telah menunaikan zakat, memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka oleh karena itu wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.

Didin menegaskan bahwasannya, apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan umum, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Kedua, kewajiban menaati perintah ulil amri (pemerintah) selama menyuruh pada kebaikan dan kemaslahatan umum. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa [4]: 59).*¹³¹

Didin mengecualikan apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 27.

¹³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 87.

secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum muslimin yang berpegang teguh pada syariat Islam, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada khaliq.¹³²

Ketiga, solidaritas social dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi,¹³³ sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam

¹³² Didin Hafiduddin, *Mutiara Dakwah*, (Jakarta: Kuwais, 2006), h. 235.

¹³³ *Ibid.*

*(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah [5]: 2).*¹³⁴

Keempat, kaidah-kaidah hukum syara'. Didin mengambil penjelasan dari Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara'.¹³⁵

Kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama berbahaya.

Menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama Yusuf Qardhawi jarang sekali mempergunakan kaidah al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan bersama yang disepakati) menyatakan bahwa jika negara sangat membutuhkan dan untuk kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan, karena khawatir adanya gangguan dan serangan dari musuh, maka boleh saja negara mengambil pajak dari orang-orang kaya untuk menutupi keperluan tersebut.

Sementara menurut mazhab Maliki, bahwa berdasarkan prinsip al-mashalih al-mursalah jika sewaktu-waktu baitul mal mengalami defisit, sedangkan anggaran negara tidak mampu membiayai, maka pada saat itu pemerintah boleh memungut secara teratur dari orang-orang kaya, harta secukupnya, sampai baitul mal terisi kembali, atau dapat mencukupi. Selain itu, pemerintah yang adil hendaklah melaksanakan pungutan ini secara teratur

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106.

¹³⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Op. Cit.*, h. 64.

pada musim panen atau saat menetam buah-buahan sehingga tidak menyulitkan orang-orang kaya dan hati mereka pun tetap merasa lega. Atas dasar itu semua, adalah sah-sah saja adanya dua pemungutan atas kaum muslimin.¹³⁶

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab IV pasal 14 ayat (3) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangi dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didin juga lebih menekankan urgensi pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dari pada negara.¹³⁷ Ia menerangkan adanya anjuran dalam nash untuk mengelola zakat oleh lembaga pengelola. Didin mengambil dari keterangan Imam Qurthubi dalam kitabnya ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah [9]: 60)*¹³⁸

¹³⁶ Didin Hafiduddin, *Mutiara Dakwah*, Op.Cit., h. 236.

¹³⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Op. Cit., h. 126.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 196.

Maksud ayat tersebut yaitu menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.¹³⁹

Didin juga berpendapat bahwasannya pengelolaan zakat oleh lembaga zakat yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki keuntungan, antara lain:¹⁴⁰

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Urgensi lembaga pengelolaan zakat yaitu jika zakat serahkan secara langsung dari muzaki kepada mustahik meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terbaikannya hal-hal di atas serta hikmah dan fungsi zakat terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

¹³⁹ Iqbal M. Ambara, *Op. Cit.*, h. 54.

¹⁴⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Loc. Cit.*

Berbeda dengan pajak, Didin berpendapat bahwa pajak memang harus diatur oleh negara. Hal itu sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan suatu pemerintahan.

B. Pendapat Masdar Farid Mas'udi Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat

1. Biografi Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan KH Mas'udi bin Abdurrahman dan ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto pada tanggal 18 September 1954.¹⁴¹ Ayahnya merupakan seorang tokoh masyarakat atau sering disebut sebagai kyai yang cukup terkenal oleh masyarakat melalui kegiatan *ta'lim* (pengajian) dari kampung kekampung. Kakeknya, kyai Abdurrahman Jombor, dikenal dengan pesantren salaf yang sebelumnya telah dirintis oleh moyangnya, yang konon merupakan turunan keenam dari mbah kyai Abdussomad yang sampai sekarang pun makam beliau masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas khususnya.¹⁴²

Pendidikan formal Masdar Farid Mas'udi diawali dari pendidikan Dasar atau Ibtidaiyah yang diselesaikannya pada tahun 1966.¹⁴³ Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo Magelang, dibawah asuhan kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan

¹⁴¹ Imdadun Rahmat, dkk, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 234.

¹⁴² Ahmad Kosasi Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>, akses pada tanggal 23 Februari 2018.

¹⁴³ www.nu.or.id, akses pada tanggal 23 Februari 2018.

menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil. Selanjutnya Masdar pindah ke pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, berguru kepada kyai Ali Maksoem (Rois Am PBNU tahun 1988-1999). Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima dikelas 3 Aliyah.

Setelah menamatkan Aliyah Masdar tidak langsung melanjutkan di Perguruan Tinggi, namun tetap tinggal di pesantren dan mengajar serta menjadi asisten pribadi kyai Ali Maksoem sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga. Baru pada tahun 1972, Masdar melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadits dan selesai pada tahun 1980. Selama menjadi mahasiswa, Masdar membut tradisi baru, yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji Alfiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga.¹⁴⁴

Setelah melalui berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan Program pasca sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994-1997.¹⁴⁵

Perjalanan karirnya dimulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktivis mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1973, terpilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta hingga tahun 1975. Kemudian terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian sekitar tahun 1983, Masdar terpilih sebagai ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa

¹⁴⁴ Ahmad Kosasi Marzuki, *loc. cit.*,

¹⁴⁵ Imdadun Rahmat, dkk, *op. cit.*, h. 234.

Islam Indonesia).¹⁴⁶ Setelah menyelesaikan kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta, dan bekerja untuk lembaga Misi Islam NU dan menjadi wartawan diberbagai mass media ibu kota.¹⁴⁷

Sebagai kordinator program P3M (Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Masdar sempat menerbitkan jurnal *Pesantren*, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit 1984-1993 serta mengorganisir pelatihan-pelatihan bersama para kyai muda pada saat itu.¹⁴⁸ Dipihak lain dengan didukung oleh Rabitah Ma'ahid Islam (RMI) dibawah pimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman salaf melalui berbagai halaqah. Dimulai dari *halaqah* watucongkol tahun 1989, dengan tema “Memahami Kitab Kuning Secara Kontekstual”, kegiatan ini terus bergulir diberbagai daerah dengan keikutsertaan para kyai, baik kyai sepuh ataupun kyai muda. Salah satu dari bentuk outputnya yang monumental adalah Rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.¹⁴⁹

Saat ini, Masdar menduduki jabatan sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus sebagai direktur P3M Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesia Corruption Watch), serta Komisi Ombudsman Republik Indonesia.¹⁵⁰

2. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi

¹⁴⁶ www.nu.or.id, *loc. cit.*,

¹⁴⁷ Ahmad Kosasi Marzuki, *loc. cit.*,

¹⁴⁸ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h.

¹⁴⁹ Ahmad Kosasi Marzuki, *loc. cit.*,

¹⁵⁰ www.nu.or.id, *loc. cit.*,

Terhitung cukup banyak kontribusi pemikiran Masdar dalam hal sosial yang berbasis keagamaan, terutama sejak aktif di P3M, diantara karya-karyanya adalah:

- a. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- b. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- c. *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- d. Artikel berjudul, ” *Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara*”, dalam M. Tuwuh dkk, *Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepeimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.
- e. Artikel berjudul, ” *Hak Milik dan Ketimpangan Sosial (Telaah Sejarah dan Kerasulan)* ”, dalam Nurcholish Madjid dkk, *Islam Universal*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.
- f. Artikel berjudul, ” *Zakat dan Keadilan Sosial*”, dalam M. Imdadun Rahmat et., *Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.

3. Pendapat Masdar Farid Mas’udi Tentang Penyatuan Pajak dan Zakat

Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Secara umum bisa dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat dikalangan umat Islam secara berangsur-angsur

ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. Pertama, kelemahan pada segi filosofinya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya. Ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan dari ketiga kelemahan tersebut telah menyebabkan zakat yang pada mulanya merupakan sebuah proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-kultur tereduksi hanya menjadi aktivitas personal yang sangat tergantung kepada kesadaran masing-masing individu dengan dampak yang juga bersifat individu.¹⁵¹

Sejarah pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw bersama para sahabat membentuk suatu negara tersebut dengan meyakinkan bahwa masyarakat tentang pentingnya kontrol sosial, sehingga keberadaan suatu lembaga negara tetap sebagai alat bukan hanya untuk kepentingan tertentu saja, melainkan kepentingan seluruh warga negara.

Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan zakat. Keadilan yang bersifat primer dan mendasar adalah dalam sistem ekonomi, dalam rangka mengentaskan kemiskinan harus ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang mulia dari keadilan ekonomi. Itulah salah satu rukun dalam Islam yang bisa menggunakan kekuasaan negara (sebagai pajak).

Berdasarkan pengamatan Masdar Farid Mas'udi, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan. Umat islam terutama para pemimpin tidak bisa melepaskan

¹⁵¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 18.

tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh negara, dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak maka umat Islam harus menanggung beban yang berat karena harus melaksanakan dua kewajiban negara. Oleh karena itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Sejak awal zakat adalah ajaran moral untuk pajak, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan ketika basis material negara ini diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajak, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya. Ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sebagai berikut.¹⁵²

Pertama, pajak dengan konsep upeti atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja atau penguasa. Sesuai dengan kodratnya setiap penguasa cenderung menyiasati rakyatnya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, pajak-upeti adalah bukti ketundukan rakyat kepada raja selaku penguasa. Karena negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur dari sudut kepentingan sang raja. Rakyat belum dianggap penting, hak-hak rakyat tidak dikenal, konstitusi sebagai acuan normatif yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban negara tidak terlaksana.

Kedua, Pajak dengan konsep “kontra-prestasi” atau *jizyah*. Negara dengan pajak *jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok yang kaya. Pemaknaan pajak sebagai *jizyah*

¹⁵² *Ibid.*, h. 88.

merupakan satu langkah maju dibandingkan dengan pemaknaan pajak sebagai upeti. kesadaran *jizyah* ini, rakyat mulai membuat perhitungan dengan negara atau penguasa yang menerimanya. Dengan semangat memperhitungkan keseimbangan dari penguasa atau pemerintah ini, muncul tradisi kenegaraan baru yang kemudian menjadi ciri khas sistem pemerintah modern. Diantara yang penting adalah lahirnya lembaga parlemen sebagai penyuara kepentingan rakyat pembayar pajak yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi, pemaknaan pajak sebagai *jizyah* yang telah membawa banyak perubahan terhadap sistem pemerintah atau kenegaraan dalam nalar *jizyah* sebagai sistem makna yang menjiwai pembayaran pajak warga kepada negara. Kesadaran moral tertinggi umat manusia mengatakan bahwa negara adalah melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat warganya, terutama rakyat yang lemah yang tidak bisa melindungi hak-haknya.

Ketiga, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat. Evolusi pemaknaan pajak, dari *udhhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontra-prestasi), kemudian ke zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat), dalam hak pemajakan merupakan amanat dari Allah, maka dana pajak yang dikumpulkan dipandang bukan sebagai milik pribadi penguasa, melainkan sebagai milik Allah. Sejak lama para raja mengklaim kekuasaan dan uang yang ada ditangannya sebagai milik Tuhan, yang terpenting memang bukan soal siapa yang memilikinya melainkan untuk siapa uang tersebut

diperuntukkan.¹⁵³

Sebagai milik Allah, pajak yang dihimpun oleh pemerintah haruslah digunakan untuk kepentingan yang diizinkan oleh Allah, yakni kemaslahatan seluruh rakyatnya, terutama rakyat yang tidak berdaya. Dalam konsep Islam penggunaan pajak ditunjukkan untuk kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, melainkan harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat, secara ruhaniah di akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Kontrol sosial terhadap negara atau pemerintah sebagai pengelola uang pajak, karena uang pajak adalah uang Allah dan rakyat sekaligus, dengan kontrol yang menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, maka lahirlah pemerintah yang bersih.

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah, untuk pertama dalam sejarah administrasi pemerintah Rasulullah SAW, kepala negara atau pemerintah mencanangkan sistem perpajakan yang didalamnya terdapat tarif pajak (*miqdar zakah*), objek pajak (*mal zakawf*), batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak yang ditetapkan dengan jelas, tegas, berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak.

Fungsi pajak sebagai instrument vital bagi keadilan keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak-zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayarkan oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan atau

¹⁵³ *Ibid.*, h. 87.

penghasilan tertentu. Mereka yang belum mencapai *nisab* dibebaskan dari beban pajak, prinsip bahwa kewajiban ini hanya dikenakan atas orang-orang yang mampu.¹⁵⁴ Dalam pemerintahan Rasulullah SAW, pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa dalam disebut sebagai zakat fitrah, sedangkan pajak atas harta yaitu zakat maal yang dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Sementara kekayaan yang dikenakan pajak adalah emas dan perak. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menetapkan jenis-jenis penghasilan dan kekayaan sebagai objek pajak yang sesuai dengan kondisi saat itu, meliputi :

- a. Hasil Pertanian (*zuru*)
- b. Hasil kebun (*tsamar*)
- c. Ternak (*mawasy*)
- d. Niaga (*urudh tijarah*)
- e. Hasil tambang (*ma'din*)
- f. Harta temuan (*rikaz*, atau harta karun)

Tarif pajak sangat rendah karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggihkan dengan dana pajak relatif masih sederhana jauh dibawah tingkat kebutuhan masyarakat modern. Kadar relatif dari tarif pajak dilihat dari sektor ekonomi yang dikembangkan pada satu pihak, atas dasar pertimbangan tersebut Rasulullah SAW menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi atas hasil pertanian dibandingkan pajak atas niaga. Penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau amil yang secara struktural memiliki kewenangan

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 101.

yang baik untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.¹⁵⁵

Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, melainkan merupakan sumber yang sangat dominan untuk pemasukan negara seluruh dunia. Acuan moral untuk penyusunan Anggaran Belanja disemua level, ini adalah etik yang paling mendasar menyangkut maksud dan tujuan moral dari lembaga kekuasaan paling berdaya yaitu negara. Sasaran-sasaran alokasi anggaran negara tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga sektor besar, yaitu:

- a. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah.
- b. Sektor biaya rutin (*amilin*).
- c. Sektor sabilillah atau layanan publik.¹⁵⁶

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritual bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Pintu material dalam sebuah negara yaitu pajak. Karena tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa adanya pajak. Islam mensucikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berpolitik melalui zakat (pajak).

Masdar menyarankan agar pajak menggunakan ruh zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat). Dengan ruh zakat ini, diharapkan bisa tercipta keadilan sosial. Bukankah zakat diperuntukkan terutama untuk orang fakir dan miskin, pajak seharusnya demikian pula. Konsep pajak dengan ruh zakat inilah yang pernah dipraktekkan nabi ketika memimpin sebuah pemerintahan di Madinah.

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 105.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 112.

Untuk bisa menerapkan konsep pajak dengan ruh zakat tidak boleh ada lagi dualisme yang dikhotomis, pajak dan zakat harus disatukan sebagaimana ruh dengan badan atau jiwa dengan raga.¹⁵⁷ Keberanian Masdar untuk menyamakan pajak dan zakat, sebagai konsekuensi untuk mengembalikan zakat sebagai ajaran bisa menuwujudkan keadilan sosial, menurut penulis bisa dimengerti dan sudah seharusnya dilakukan untuk mengembalikan Islam sebagai agama pembebas bagi umat manusia termasuk pembebas dari kemiskinan dan kezaliman.

Mengenai objek pajak/zakat (*mal qakawi*), Masdar berpendapat bahwa Nabi (syari') hanya menetapkan objek pajak/zakat yang sekunder, yaitu jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dimana pajak/zakat ditetapkan yakni pada abad ke-7.¹⁵⁸ Dengan demikian, untuk konteks modern banyak sekali kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan oleh Nabi dan bukan berarti itu tidak wajib dizakati/pajaki. Jikalau hal-hal baru ini sudah ada pada masa Nabi tentu hal-hal itu dikenakan zakat/pajaknya.

Pendapat Masdar mengenai tarif (*miqdar*) pajak/zakat menjadi salah satu hal penting. Menurutny, Nabi dalam menetapkan tarif pajak/zakat adalah berdasarkan berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Tarif pajak/zakat pada masa rasul antara 2,5-10% kecuali *rikaz* (harta karun) yang sampai 20% dikarenakan upaya memperolehnya gampang.

Jadi tarif 2,5-10% menurut Masdar dikarenakan 1) faktor kebutuhan yang

¹⁵⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 117.

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 137.

pada waktu itu masih sederhana. Artinya dengan pengenaan pajak/zakat segitu sudah dapat mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara Islam. 2) faktor kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin pada masa itu belum terlalu jauh.¹⁵⁹

Pada masa Nabi sektor perekonomian yang sangat dominan dan menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat Madinah adalah sektor pertanian. Oleh sebab itu, tarif pajak/zakat pertanian lebih besar yakni 5% daripada tarif pajak/zakat niaga yang hanya sebesar 2,5%. Dengan demikian, kalau sektor yang dominan dan menimbulkan kesenjangan masyarakat juga berubah idealnya tarif pajak/zakat juga bisa berubah.

Pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah salah satu kekeliruan, karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat tanpa memandang agama, ras dan suku bangsa. Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama dengan membayar zakat karena setiap yang membayar pajak harus disertai nilai membayar zakat kemudian harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana yang dibayarkan tersebut tidak diselewengkan.

Pendapat Masdar Farid Mas'udi untuk menyamakan pajak dengan zakat. Dengan begitu, orang yang sudah membayar zakat sudah dianggap membayar pajak, begitu pula sebaliknya orang yang sudah membayar pajak sudah dianggap gugur kewajiban zakatnya. Kalau pun langkah seperti ini tidak bisa dijalankan, bisakah pembayaran zakat mengurangi kewajiban pembayaran

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 139-142.

pajak.

Usulan yang pertama, untuk saat ini memang agak sulit dilaksanakan karena masih ada anggapan bahwa kalau pajak disamakan dengan zakat jumlah penerimaan pajak akan menurun dan penerimaan zakat akan meningkat.

Usulan yang kedua yaitu pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pembayaran/setoran pajak sudah terlaksana. Meskipun demikian, zakat baru sekedar diakui sebagai biaya tetapi belum menjadi bagian dari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, hal ini masih menjadi tuntutan dari umat Islam.

Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala spiritual-ukhrawi, karena dengan niat tersebut menjadi harapannya. Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedangkan amal adalah badan persambungannya dengan manusia. keduanya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai lembaga yang berkepentingan untuk mengatur kehidupan. Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu.

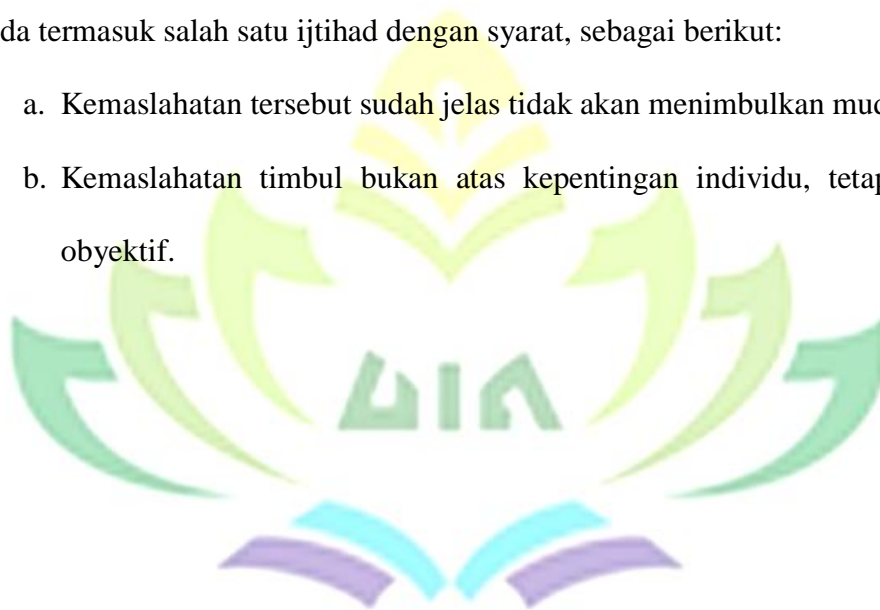
Pemikiran masdar Farid Mas'udi secara keseluruhan adalah memiliki paradigma yang banyak didominasi oleh pembahasan kemaslahatan dan keadilan yang muncul sebagai tujuan agama Islam dalam rangka pencapaian agama tersebut, melalui penyatuan zakat dan pajak ini ada dalam Konsep Kemaslahatan Sosial.

Masdar Farid Mas'udi meyakini bahwa hukum syariat yang diturunkan

oleh Tuhan adalah aturan dengan kemaslahatan. Artinya aturan yang harus mengabdikan pada kemaslahatan bukan sebaliknya. Tetapi bukan seluruh aturan bisa dirubah dengan alasan kemaslahatan.

Konteks kemaslahatan semua manusia ingin meraih kemaslahatan untuk individu masing-masing yang berlandaskan hukum Islam. Kemaslahatan yang ada termasuk salah satu ijtihad dengan syarat, sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut sudah jelas tidak akan menimbulkan mudharat.
- b. Kemaslahatan timbul bukan atas kepentingan individu, tetapi harus obyektif.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Persamaan Pendapat Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi Mengenai Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat

Terdapat beberapa persamaan mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat dalam pandangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan kemaslahatan dan keadilan secara menyeluruh. Didin dan Masdar meski berbeda pendapat mengenai kewajiban penyatuan zakat dan pajak akan tetapi memiliki syarat sebagai suatu keputusan yaitu tidak memberatkan masyarakat akan suatu kebijakan. Hal ini merupakan dasar dalam mengambil langkah yang menjadi titik awal dalam melaksanakan suatu keharusan baik untuk manfaat secara langsung maupun secara tidak langsung dirasakan oleh seorang individu tersebut. Didin dan Masdar berpegangan pada salah satu kaidah yang mana mengutamakan kemaslahatan orang banyak yang merupakan salah satu ajaran Islam.
2. Menjadikan zakat pengurang pajak sebagai alternative lain dalam kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Masdar dan Didin mengajukan usulan sebagai alternative untuk mencapai keadilan secara keseluruhan. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan pemerintahan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan adanya potongan pajak karena pembayaran zakat dengan syarat beragama Islam dan benar-benar sudah membayar zakat dengan bukti pembayaran zakat dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Meski belum optimal dalam menjalankan

dan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan terutama dalam pengaturan dana. Hal ini dikarenakan lembaga pengelolaan pajak dan zakat berbeda.

B. Perbedaan Pendapat Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi Mengenai Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat

Didin Hafiduddin terfokuskan pada konsep pemikiran zakat di Indonesia yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat di Indonesia. Didin menganggap pajak dan zakat berbeda baik dari segi manfaat maupun tujuannya. Didin menganggap menaati ulil amri yang bertujuan kemaslahatan dan kebaikan merupakan suatu keharusan. Selain itu pula, dalam Islam mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan, dari pajak maupun zakat memiliki perannya masing-masing.¹⁶⁰

Pajak dalam pandangan Didin merupakan bentuk sedekah dalam agama Islam dimana dana atau harta yang diberikan kepada negara akan digunakan untuk keadilan menyeluruh meskipun tidak secara langsung. Dana pajak tersebut akan digunakan untuk prasarana atau pembangunan suatu wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya.

Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat. Didin menyatakan bahwa pengelolaan zakat sangatlah penting namun tidak menekankan pengelolaan zakat harus dilakukan langsung oleh negara (pemerintah) melainkan hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah. Didin menggaris bawahi bahwa pengelolaan zakat tersebut haruslah

¹⁶⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Op.Cit.*, h. 60.

memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah.¹⁶¹ Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah adalah lembaga pengumpul zakat, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional terutama yang berkonsentrasi dalam pengelolaan zakat profesi. Pemikiran Didin ini di latarbelakangi oleh pemikirannya yang menyatakan bahwa zakat tidak dapat disatukan dengan pajak serta dipengaruhi oleh pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua BAZNAS sehingga paradigma yang muncul pun sesuai dengan apa yang dia dapatkan dilapangan. Akan tetapi jika sekiranya pembayaran pajak dan zakat memberatkan, Didin lebih mengusulkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak dengan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Berbeda dengan pemikiran Masdar yang bercorak populis, yaitu menjunjung tinggi keutamaan rakyat kecil. Hal ini terbukti dalam setiap pemikirannya mengarah dengan pembelaan kaum lemah. Sebagaimana diketahui, tawaran yang dimaksud “kemaslahatan” oleh Masdar adalah “kemaslahatan bagi kaum lemah (*dhuafa*)”.¹⁶² Dalam salah satu tulisannya ia menyamakan istilah kemaslahatan dengan “keadilan sosial”. Selanjutnya pemikiran Masdar mengenai penyatuan zakat dengan pajak menjadi titik pusat bahwa negara/pemerintah harus mengelola zakat sebagaimana halnya zakat dikelola oleh negara/pemerintah pula. Dalam konteks ini, gagasan zakat Masdar yang diorientasikan guna merumuskan suatu paradigma fiqh untuk menggugah

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 132.

¹⁶² **Masdar Farid Mas'udi**, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, *Op. Cit.*, h. 116.

kesadaran umat akan pentingnya kepedulian terhadap kaum lemah, sangat dilatarbelakangi oleh paham populis.

Masdar menganggap bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu bentuk madharat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Bisa jadi pajak yang awalnya hanya sebagai factor pendukung dalam pemasukan negara saat ini menjadi suatu kewajiban yang lebih diutamakan dari pada zakat. Hal ini sangatlah menyalahi ketentuan di awal dan juga memberatkan.

Perlunya tindakan untuk mengedepankan zakat di atas pajak yang menjadi kewajiban utama sebagai muslim terlebih lagi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masdar meyakini zakat dan pajak yang menjadi kewajiban dapat diperkecil dengan disatukan untuk mengurangi kedzaliman. Masdar menyarankan agar pajak menggunakan ruh zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat). Dengan ruh zakat ini, diharapkan bisa tercipta keadilan sosial. Bukankah zakat diperuntukkan terutama untuk orang fakir dan miskin, pajak seharusnya demikian pula. Konsep pajak dengan ruh zakat inilah yang pernah dipraktekkan nabi ketika memimpin sebuah pemerintahan di Madinah.¹⁶³

Penerapan konsep pajak dengan ruh zakat tidak boleh ada lagi dualisme yang dikhotomis, pajak dan zakat harus disatukan sebagaimana ruh dengan badan atau jiwa dengan raga. Keberanian Masdar untuk menyamakan pajak dan zakat, sebagai konsekuensi untuk mengembalikan zakat sebagai ajaran bisa mewujudkan keadilan social. Islam sebagai agama pembebas bagi umat

¹⁶³ *Ibid.*, h. 40.

manusia termasuk pembebas dari kemiskinan dan kezaliman. Sesuai dengan kaidah fiqh:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.*¹⁶⁴

Kaidah fiqh inilah yang menjadi titik berat dalam suatu alasan pemikiran untuk Masdar dalam pengajuan penyatuan pajak dan zakat dengan mengutamakan pembayaran zakat dari pajak sebagai kewajiban dalam hukum Islam.

Selain dari penyatuan antara zakat dan pajak masdar juga mengajukan adanya tindakan sebagai zakat mengurangi pajak. Artinya orang yang sudah mengeluarkan zakat atas suatu harta dalam ketentuan dapat mengurangi pajak pula yang telah ditentukan oleh negara. Sehingga hal ini tidak memberatkan masyarakatnya dalam memperoleh kemaslahatan bersama dan tidak adanya ketimpangan yang mencolok.

Pemikiran Masdar tentang zakat merupakan manifestasi sikap atau tanggung jawab intelektual pemikir muslim ketika melihat fenomena “ketidakadilan sosial”, yakni adanya jarak antara kelompok sosial kaya dengan kelompok sosial miskin. Jadi wajar, jika “keadilan sosial” menjadi fenomena yang menggelisahkan bagi Masdar, karena itu termasuk pemikir populis. Dengan berpijak pada perspektif agama, Masdar melihat bahwa problem tersebut bisa diselesaikan melalui

¹⁶⁴ Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ Wa Mâ Tafarra'a 'Anha*, (Riyad: Dar Al-Belnesia, 1417 H), h. 527.

penggalan dana zakat. Karena zakat merupakan salah satu kelima rukun Islam yang paling memiliki akses kepada keprihatinan Masdar yakni “ketidakadilan sosial”. Pemikiran Masdar yang populis ini dipengaruhi oleh paham populis (kerakyatan)-nya sehingga melahirkan pernyataan bahwa zakat dan pajak sama-sama dikelola oleh negara, sehingga dapat menjadi awal titik temu antara pajak dan zakat.

Indonesia memiliki peraturan khusus mengenai pajak dan zakat agar dapat berjalan sesuai tujuan serta membatasi wewenang sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan cara lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan secara menyeluruh. Meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat kurang. Terlebih lagi lembaga pajak dan zakat dilakukan secara terpisah. Sehingga menjadi pemicu tindakan yang kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Zakat atas penghasilan sesuai UU Nomor 36 tahun 2008 sudah boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau bisa dianggap sebagai biaya. Tetapi harus ada syaratnya. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan (dianggap sebagai biaya) tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang secara resmi sudah diakui, diakreditasi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b dijelaskan bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan.¹⁶⁵

¹⁶⁵ www.businessnews.com. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan. Pemotongan zakatnya adalah sebelum penghasilan dihitung dengan tarif progresif. Atau dengan kata lain, zakat dikenakan pada penghasilan bruto.

Kemudian di dalam Undang-undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 dikemukakan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹⁶⁶ Diktum tersebut secara jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZ dan LAZ yang sah menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, sudah terjadi kesesuaian antara Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan Undang-undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 dalam hal bolehnya pembayaran zakat menjadi pengurang pajak. Meskipun demikian, zakat baru sekedar diakui sebagai biaya tetapi belum menjadi bagian dari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, hal ini masih menjadi tuntutan dari umat Islam.

¹⁶⁶ Undang-undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikianlah pemaparan terhadap analisis “Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafiduddin Dan Masdar Farid Mas’udi”, dari hasil pemaparan penulis yang telah penulis telaah, maka penulis mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Persamaan pandangan baik Didin dan Masdar yaitu segala keputusan berlandaskan dengan menimbang kemaslahatan dan keadilan orang banyak karena hal ini sangat berpengaruh kepada keseluruhan. Selain itu, Didin dan Masdar juga menyetujui adanya zakat sebagai pengurang pajak agar tidak adanya yang merasa terbebani atas kedua kewajiban tersebut. Dengan melihat zakat sebagai keharusan yang wajib bagi umat Islam dan pajak sebagai keharusan atas ulil amri.
2. Perbedaan Pendapat Didin Hafiduddin yang terfokuskan pada konsep pemikiran zakat di Indonesia yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat di Indonesia. Didin menganggap pajak dan zakat berbeda baik dari segi manfaat maupun tujuannya. Selain itu, dalam tatanan lembaga pengelola zakat dan pajak dilakukan secara terpisah karena zakat merupakan keharusan yang dilakukan muslim sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara. Dalam melaksanakan pajak dan zakat, Didin mengajukan adanya zakat sebagai pengurangan pada

pajak. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang merasa adanya dualisme kewajiban pembayaran pajak tersebut tidak memberatkan.

Sedangkan menurut Masdar melihat dari corak mengutamakan kaum rakyat, dimana rakyat lebih diutamakan kemaslahatan dan keadilannya. Menawarkan adanya pembentukan baru dalam suatu kewajiban pembayaran antara zakat dan pajak, masdar menawarkan adanya penyatuan atau pun pengurangan antara keduanya. Masdar menganggap bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu bentuk madharat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Konsep pajak dengan ruh zakat tidak boleh ada lagi dualisme yang dikhotomis, pajak dan zakat harus disatukan sebagaimana ruh dengan badan atau jiwa dengan raga. Sehingga dalam penerapannya pun menjadikan suatu pajak dan zakat merupakan suatu kesatuan dimana zakat lebih diutamakan daripada pajak.

B. Saran

Saran-saran yang penulis uraikan dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran serta mencapai tujuan-tujuan negara dalam berbagai bidang.

Meskipun zakat dan pajak berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan bersama.

2. Adapun adanya perbedaan pendapat dari kedua tokoh ini dalam metode qiyas yang memiliki pandangan berbeda merupakan lumrah dan manusiawi, pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu: melakukan pembayaran dengan mengutamakan keadilan baik pada zakat maupun pajak dengan ketentuan yang berlaku.
3. Di Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai zakat dan pajak. Zakat atas penghasilan sesuai UU Nomor 36 tahun 2008 sudah boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau bisa dianggap sebagai biaya. Tetapi harus ada syaratnya. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan (dianggap sebagai biaya) tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang secara resmi sudah diakui, diakreditasi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Moh. Suyono. *Fiqih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2001.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penellitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat*. Bandung : Penerbit Marja, 2008.
- Al-Maraghi. *Tafsir Al-maraghi*. Jilid 1. Kairo: Maktabah Djarisah, 1365 H.
- Al Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Jilid I. Beirut: Dar al Fikr, 1999 M.
- Ambara, Iqbal M. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Sketsa, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*. Damaskus: Daar El-Fikr, 1997
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Bruinessen, Martin Van. NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana, Yogyakarta: LKIS, 1994.**
- Chapra, Umer. *Islam and The Economic challeng*. Herndon: IIIT, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponorogo, 2014.
- Doa, M. Djamal. *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hafidudin, Didin. *Islam Aplikatif*, Cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2003.

------. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

------. *Mutiara Dakwah*. Jakarta: Kuwais, 2006.

----- dan Hendri Tanjung. *Syariah principles on management in practice*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

----- dan Miranty Abidin. *Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli umat, 2001.

Imam Syafi'I. *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al-Fiqh*. Beirut: Lubnan, 1979.

Inayah, Gazi. *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*. Dirasah Muqaranah, 1995. Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Kacilan M.S.. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.

Kurnia, Hikmat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultummedia, 2008.

Mahadi, Ujang. *Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pns, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*. Bengkulu: PPIK, 1998.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset, 2003.

Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

------. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. **Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.**

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006.

Nasution, Lahmuddin. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Ogos, 1995.

Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta : Granit, 2003.

Prakoso, Kesit Bambang. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Rahmat, Imdadun dkk. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. **Jakarta: Erlangga, 2003.**

Rosyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. Ke-30. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997.

Salim, Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid *Ensiklopedi Puasa Dan Zakat*. Terjemahan Abu Syafiq, dkk. Jakarta: Roemah Buku, 2013).

Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiah, 1986.

S Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012.

Shalih Bin Ghanim As-Sadlan. *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ Wa Mâ Tafarra'a 'Anha*. Riyad: Dar Al-Belnesia, 1417 H

Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sumitro, Rocmat. *Asas dan Dasar perpajakan*. Bandung: Eresco, 1992.

Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutedi, Andrian. *Hukum Pajak*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*. Terjemahan oleh Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian, 1987.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Undang-undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000

Qadim, Abdul. *Al-Amwal fi daulah al-Khilafah*. Dar al-ilmi lilmalayin, 1988. Edisi terjemah oleh Ahmad dkk. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

W. I. S. Poerdaminto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yusuf Al-Qardawi. *Fiqhuz Az-Zakat*. Beirut: Muasassah Al-Risalah, 1980.

